

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerajaan Koto Besar diperkirakan telah ada sejak akhir abad ke-17 Masehi.¹ Koto Besar tumbuh dan berkembang bersama daerah-daerah lain yang berada di bekas wilayah Kerajaan Melayu Dharmasraya (*Swarnabumhi*).² Daerah-daerah ini merupakan kerajaan kecil yang bercorak Islam dan berafiliasi dengan Kerajaan Pagaruyung, seperti Pulau Punjung yang dikenal sebagai *camin taruih* (perpanjangan tangan) Pagaruyung untuk daerah Hiliran Batanghari, serta penguasa lokal di *ranah cati nan tigo*, yaitu Siguntur, Sitiung dan Padang Laweh.³ Koto Besar menjadi satu-satunya kerajaan di wilayah ini yang tidak berpusat di pinggiran Sungai Batanghari.⁴

Lokasi berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut merupakan daerah *rantau* dalam konsep alam Minangkabau.⁵ Pepatah adat Minangkabau mengatakan,

¹ Merujuk pada tulisan yang tercantum pada stempel peninggalan Kerajaan Koto Besar yang berangka tahun 1697 Masehi.

² Kerajaan Melayu Dharmasraya (*Swarnabumhi*) adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu Buddha dan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu Jambi yang bermigrasi dari muara Sungai Batanghari. Kerajaan Melayu Dharmasraya hanya bertahan sekitar dua abad (1183 – 1347), setelah dipindahkan oleh Raja Adityawarman ke pedalaman Minangkabau di Saruaso. Bambang Budi Utomo dan Budhi Istiawan, *Menguak Tabir Dharmasraya*, (Batusangkar : BPPP Sumatera Barat, 2011), hlm. 8-12.

³ Efrianto dan Ajisman, *Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Dharmasraya*, (Padang: BPSNT Press, 2010), hlm. 84.

⁴ Menurut Tambo Kerajaan Koto Besar dijelaskan bahwa Kerajaan Koto Besar berpusat di tepi Sungai Baye. Hal ini juga dikuatkan oleh catatan Kontroler Belanda Palmer van den Broek tanggal 15 Juni 1905. Lihat, Tambo Kerajaan Koto Besar, “*Sejarah Anak Nagari Koto Besar yang Datang dari Pagaruyung Minangkabau*”. Lihat juga, “Nota over Kota Basar en Onderhoorige Landschappen Met Uitzondering van Soengei Koenit en Talao”, dalam *Tijdschrift voor Indische, Taal, Land en Volkenkunde*, (Batavia: Kerjasama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen dan Batavia Albrecht & Co., 1907), hlm. 281.

⁵ *Rantau* merupakan wilayah yang berada di lembah-lembah sungai atau anak-anak sungai yang berasal dari pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka. Penduduk *rantau* berasal dari *darek* dan merupakan daerah koloni Alam Minangkabau. M.D. Mansoer, dkk., *Sedjarah Minangkabau*, (Djakarta: Bhratara, 1970), hlm. 3.

“*Luhak bapangulu, rantau barajo*”, (*Luhak* berpenghulu, *rantau* beraja), yang bermakna pemerintahan di wilayah *luhak* diatur oleh penghulu, sedangkan untuk kawasan *rantau* diatur oleh raja.⁶ Simbol kekuasaan seorang penghulu terletak di *nagari*, dan simbol kekuasaan seorang raja berada di daerah *rantau*. Di kawasan *rantau*, terdapat berbagai kecenderungan penduduknya lebih berorientasi hirarki, dengan tipe masyarakatnya yang otoritarian (otokratis).⁷

Raja-raja di bawah panji Kerajaan Pagaruyung telah menyebar ke berbagai daerah di wilayah *rantau*. Setidaknya terdapat 56 kerajaan kecil yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Barat, seperti Kerajaan Padang Nunang dan Kerajaan Sontang di Kabupaten Pasaman, Kerajaan Kinali, Kerajaan Parik Batu dan Kerajaan Talu di Kabupaten Pasaman Barat, Kerajaan Lunang dan Kerajaan Indrapura di Kabupaten Pesisir Selatan, Kerajaan Koto Anau di Kabupaten Solok, Kerajaan Sungai Pagu di Kabupaten Solok Selatan, Kerajaan Jambu Lipo di Kabupaten Sijunjung, dan lain-lain.⁸

Sebagaimana lazimnya *nagari-nagari* di Minangkabau, daerah-daerah tersebut lebih merupakan wujud otonomi dalam mengatur pemerintahan sendiri dan diberi kekuasaan cukup besar melebihi seorang *datuak* atau penghulu.⁹ Meskipun diberikan hak istimewa, terdapat campur tangan Pagaruyung terhadap daerah-daerah ini dalam berbagai hal dan kepentingan, seperti mengukuhkan

⁶ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafiti Press, 1984), hlm. 104.

⁷ Elizabeth E. Graves, *Asal-usul Elite Minangkabau Modern*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 37.

⁸ Nopriyasman, “Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat”, *Disertasi*, (Denpasar: Program Studi Kajian Budaya Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2011), hlm. 378.

⁹ Tsuyoshi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 24.

pengangkatan seorang raja, menetapkan peraturan yang tak bisa diputuskan oleh raja dan ninik mamak di *rantau*, serta menerima upeti berupa *mas manah* setiap tiga tahun sekali sebagai simbol pengakuan kekuasaan dari raja di *rantau*.¹⁰

Pewaris dari kerajaan-kerajaan yang berada di *rantau* mengakui, bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Pagaruyung. Dalam konteks ini muncul hubungan yang diistilahkan dengan *sapiah balahan*, *kuduang karatan*, *kapak radai*, dan *timbangan pacah* dari Kerajaan Pagaruyung.¹¹ Kerajaan Koto Besar merupakan salah satu *sapiah balahan* dari Kerajaan Pagaruyung, yaitu keturunan dari pihak perempuan yang secara matrilineal diangkat menjadi raja di luar Kerajaan Pagaruyung.¹² Raja Kerajaan Koto Besar bergelar Yang Dipertuan Sri Maharaja Diraja atau sehari-hari dipanggil Tuanku Kerajaan.

Dalam catatan sejarah, Koto Besar merupakan sebuah daerah yang memiliki peranan yang cukup penting di wilayah Distrik Batanghari. Koto Besar adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis sebagai penghubung antara *ikua darek kapalo rantau* Minangkabau di Sungai Pagu dengan wilayah teritorial Kerajaan Jambi. Koto Besar adalah ibukota pemerintahan Distrik Batanghari sebelum dipindahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Sungai Dareh tahun 1913.¹³

Pada awal abad ke-20, Koto Besar merupakan sebuah negeri merdeka yang memiliki pengaruh di wilayah Batang Siat, serta mendapat pengakuan dari pemimpin-pemimpin lokal di sekitar Batang Asam dan Jujuhan, seperti Tan Tuah

¹⁰ Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 291-306. Lihat juga, Rusli Amran, *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981), hlm. 13.

¹¹ Nopriyasman, *Op.Cit*, hlm. 249.

¹² *Ibid.*, hlm. 252.

¹³ Rusli Amran, *Op.Cit*, hlm. 11.

Raja Setia Alam di Indamar (Sinamar), Tan Tuah Raja Hitam di Batukangkung, Tan Tuah Raja Sailan di Sungai Kunyit dan Depati Pamuncak di Pulau Batu.¹⁴

Luasnya pengaruh yang dimiliki oleh Kerajaan Koto Besar, disinyalir sebagai penyebab utama kolonial Hindia Belanda ingin menguasainya. Dalam buku Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang* disebutkan bahwa Koto Besar merupakan salah satu daerah di Pulau Sumatera yang diharapkan Belanda takluk secara damai pada awal abad ke-20.¹⁵ Koto Besar memang ditaklukkan tanpa perlawanan, karena salah seorang kemenakan Yang di Pertuan yang bergelar Tuanku Mudo, mulai menjalin hubungan dengan Belanda dan meyakinkan pihak kolonial bahwa para pemimpin di wilayah Batang Siat serta daerah-daerah lainnya yang berada di bawah supremasi Koto Besar akan bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda.¹⁶ Koto Besar menjadi bagian dari wilayah *Residentie Sumatera Westkust* pada tahun 1905, setelah melakukan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda bersama penguasa lainnya di Distrik Batanghari.¹⁷

Peralihan kekuasaan dari Yang di Pertuan ke Pemerintah Hindia Belanda, membuat sistem kerajaan dihapuskan, sehingga bermuara pada hilangnya pengaruh Yang di Pertuan Koto Besar. Meskipun begitu, pewarisan gelar kepemimpinan tradisional tetap dilanjutkan secara turun-temurun oleh kelompok pewarisnya. Dalam dinamikanya, Kerajaan Koto Besar beralih fungsi sebagai

¹⁴ “Nota over Kota Basar en Onderhoorige Landschappen Met Uitzondering van Soengei Koenit en Talao”, *Op.Cit*, hlm. 282.

¹⁵ Daerah-daerah lain di Pulau Sumatera yang diharapkan Belanda takluk secara damai adalah Dataran Tinggi Karo, Pakpak, Kawasan Danau Toba dan Samosir, Silindung, Rokan, Gunung Sahilan, Rantau Sibayang, Kuantan Singingi, Pulau Panjang, Sungai Kunit dan Tebo. Lihat, Peta Keadaan Penaklukan Pulau Sumatera Awal Abad ke-20, dalam Rusli Amran, *Sumatera Barat Plakat Panjang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 388.

¹⁶ “Nota over Kota Basar en Onderhoorige Landschappen Met Uitzondering van Soengei Koenit en Talao”, *Op.Cit*, hlm. 286-287.

¹⁷ *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, *Op.Cit*, hlm. 12.

perantara dalam sistem pemerintahan kolonial, yang ditugaskan untuk mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pewaris Kerajaan Koto Besar lebih banyak membahas tentang persoalan yang terjadi di tingkat kaum, seperti pengangkatan penghulu, menentukan batas tanah ulayat antara satu kaum dengan kaum lainnya, serta menyediakan pajak untuk Pemerintah Hindia Belanda.¹⁸

Setelah proklamasi kemerdekaan, para pewaris kerajaan di berbagai daerah di Indonesia berusaha mengembalikan kekuasaan nenek moyang mereka pada masa silam. Mereka mendapat legitimasi berdasarkan atas status yang didapat dari keturunan, bisa saja berasal dari saudara, anak atau kemenakannya.¹⁹ Begitu juga halnya dengan pewaris Kerajaan Koto Besar. Meskipun realitanya mereka tidak mampu mengembalikan pengaruh Kerajaan Koto Besar seperti masa dahulunya, peninggalan Kerajaan Koto Besar tetap dipandang sebagai simbol adat istiadat yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya. Legitimasi sebagai pewaris kerajaan inilah yang akan menjadi modal sosial mereka dalam mengambil peran di tengah masyarakat pada masa-masa selanjutnya.

Pada masa Orde Baru, tepatnya pada masa kepemimpinan Sutan Ilyas sebagai pemangku adat Koto Besar, modal sosial kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung konsep pembangunan yang dicanangkan di wilayah adatnya. Hal ini dapat dilihat dalam konteks pembangunan Jalan Lintas Sumatera dan program transmigrasi Sitiung.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁹ Nopriyasman, "Peranan Institusi Raja dalam Masa Kemerdekaan di Indonesia", *Makalah*, dalam Seminar Sejarah Borneo Ke-3 tentang Kerajaan-Kerajaan Melayu dan Hubungannya dengan Kesultanan Brunei, Brunei Darussalam pada tanggal 27-29 Agustus 2013, hlm. 208.

Pada tahun 1964 pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bernama “Otorita Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera”.²⁰ Melalui lembaga ini, kaki tangan pemerintah di daerah melakukan pendekatan dengan pewaris Kerajaan Koto Besar untuk membebaskan tanah ulayat mereka di perbatasan Provinsi Jambi hingga perbatasan Nagari Koto Baru. Dalam kurun waktu tahun 1976-1980, secara bertahap pemerintah juga mulai mendatangkan masyarakat transmigran dari Maninjau dan Pulau Jawa. Pewaris Kerajaan Koto Besar merupakan salah satu pihak yang dilibatkan dalam proses kelancaran program tersebut, karena mereka adalah pemilik tanah ulayat di salah satu lokasi penempatan masyarakat transmigran, yaitu di daerah transmigrasi Sitiung IV.²¹

Sejak tanggal 7 Desember 1985 Sutan Darman terpilih sebagai pemangku adat Kerajaan Koto Besar. Pada saat ini struktur pemerintahan di Koto Besar telah berubah dari pemerintahan *nagari* menjadi pemerintahan desa. Peralihan sistem pemerintahan membuat pewaris kerajaan semakin kehilangan peran dan fungsinya. Hal ini berdampak kepada struktur masyarakat dan sistem adat di Koto Besar, sehingga banyak masyarakat mulai lupa dengan nilai-nilai historis dan kebudayaan lokal yang mereka miliki. Tradisi dan identitas masa lampau Koto Besar berangsur-angsur hilang dan benda-benda peninggalan kerajaan tidak terpelihara.

Meskipun demikian, dalam urusan pemerintahan di Koto Besar pewaris kerajaan tetap yang terkemuka. Selama pemerintahan desa, pewaris Kerajaan

²⁰ *Lembaran Negara Republik Indonesia*, Peraturan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 1964 tentang Otorita Jalan Lintas Sumatera: Bab I Pasal 1.

²¹ Efrianto, “Penerimaan Masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru Terhadap Transmigran (1974-2013)”, *Tesis*, (Padang: Jurusan Ilmu Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, 2015), hlm. 3.

Koto Besar selalu yang terpilih menjadi kepala desa. Kondisi ini menjadi daya tarik bagi pemerintah, sehingga kelompok pewaris kerajaan dimanfaatkan dalam memobilisasi massa dan menariknya menjadi pendukung partai pemerintah, Partai Golkar. Klimaksnya, Sutan Darman Tuanku Kerajaan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sawahlunto Sijunjung periode 1999-2004.²²

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, dinamika politik Indonesia memasuki zaman reformasi. Peralihan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan munculnya otonomi daerah, yang dikuatkan dengan Peraturan “*babaliak ka nagari* untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat.”²³ Sebuah kebijakan yang sejalan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang membuat tatanan pemerintahan lebih bersifat partisipatif, transparan dan akuntabel, serta membuat pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sebuah daerah.²⁴

Era reformasi menjadi titik awal kebangkitan identitas kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Di Provinsi Sumatera Barat, Kerajaan Pagaruyung menjadi pionir kebangkitan para pewaris kerajaan untuk tampil kembali ke permukaan. Hal ini ditandai dalam bentuk politik representasi yang mereka lakukan melalui upaya penaikan pamor lembaga raja dan kerajaan, mengaktualisasi Lembaga Pucuk Adat Alam Minangkabau (LPAAM), serta menganugerahkan gelar kepada individu-individu yang mereka anggap berjasa dalam melestarikan kebudayaan,

²² Arsip DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung 1999-2004.

²³ Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (eds), *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 1.

²⁴ Puspa Delima Amri, “Dampak Ekonomi dan Politik UU No 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah”, *Makalah*, Jakarta: Departemen Ekonomi CSIS, 2000.

seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Tuanku Ja'far Bin Tuanku Abdul Rahman dan Megawati Soekarno Putri.²⁵

Bangkitnya kembali identitas Kerajaan Pagaruyung, berpengaruh luas kepada para pewaris kerajaan Minangkabau yang berada di daerah *rantau*, salah satunya adalah kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar. Kebangkitan pewaris Kerajaan Koto Besar ditandai dalam bentuk usaha yang mereka lakukan untuk turut serta dan berperan dalam pemekaran daerah Kabupaten Dharmasraya. Begitu juga dalam pemilihan legislatif di Dharmasraya, dua tokoh pewaris kerajaan, Sutan Darman Tuanku Kerajaan dan Aprisal Tuanku Rajo Dipati ikut berkontestasi menuju kursi legislatif daerah. Partisipasi pewaris Kerajaan Koto Besar dalam konteks politik lokal di Kabupaten Dharmasraya merupakan sebuah realita untuk menonjolkan kembali peran mereka sebagai penguasa wilayah Batang Siat pada masa dulu kala.

Dalam dinamikanya, pewaris Kerajaan Koto Besar berpotensi untuk membangun legitimasi kekuasaan dan tampil menonjol dalam kancah politik lokal di Kabupaten Dharmasraya. Modal ekonomi (*economic capital*) yang lebih baik dibandingkan masyarakat lainnya menjadi kekuatan utama bagi pewaris Kerajaan Koto Besar untuk membangun jaringan kekuasaan. Hal ini juga ditunjang oleh modal politik (*politic capital*) sebagai pengurus Partai Golkar sejak zaman Orde Baru dan anggota DPRD Kabupaten Sawahlunto Sijunjung 1999-2004. Selanjutnya, pewaris Kerajaan Koto Besar juga memiliki modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) dan modal simbolik (*symbolic capital*)

²⁵ Nopriyasman, *Op.Cit.*, hlm. 221-262.

sebagai kelompok yang berasal dari keturunan “raja-raja” untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya. Oleh sebab itu, dengan segala kelebihan dan kharisma yang dimiliki oleh pewaris Kerajaan Koto Besar, dua orang tokohnya, yaitu Sutan Darman Tuanku Kerajaan dan Aprisal Tuanku Rajo Dipati terpilih sebagai perwakilan legislatif di Kabupaten Dharmasraya. Sutan Darman, ia bukan hanya terpilih sebagai anggota, tetapi juga berperan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya periode pertama (2004-2009).

Sejak tanggal 24 Desember 2012 Sutan Riska terpilih sebagai pemangku adat Kerajaan Koto Besar.²⁶ Ia mewarisi gelar Yang di Pertuan Sri Maharaja Diraja pada usia 23 tahun. Setelah terpilih menjadi pemangku adat Kerajaan Koto Besar, Sutan Riska melakukan sebuah gebrakan yang tak pernah dilakukan oleh pemangku adat sebelumnya, yaitu menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sempat putus selama ratusan tahun dengan pihak pewaris Kerajaan Pagaruyung. Penjalinan kembali hubungan kedua pewaris kerajaan ini dilakukan melalui upacara “*maungkai sumpah, mambukak kabek*” atau pencabutan sumpah terlarang antara pendiri Kerajaan Koto Besar Tuan Puti Langguk dan Raja Pagaruyung kala itu, Sutan Sahih Alam untuk tidak mengunjunginya satu sama lain sampai waktu yang tak ditentukan.²⁷

Pencabutan sumpah terlarang tersebut, dilakukan pada tanggal 25 Mei 2013 di kediaman pemangku adat Kerajaan Koto Besar, yang dihadiri oleh pewaris kerajaan di kedua belah pihak dan beberapa perwakilan dari pewaris kerajaan-kerajaan di wilayah adat Minangkabau, seperti Abdul Haris Tuanku Sati dari

²⁶ “Sutan Darman Tuanku Kerajaan Dikebumikan, Riska Menjadi Sultan Sri Maharajo Dirajo”, *Haluan*, 26 Desember 2012.

²⁷ Efrianto dan Ajisman, *Op.Cit.*, hlm. 99.

Kerajaan Pulau Punjung, Sutan Hendri Tuanku Bagindo Ratu dari Kerajaan Siguntur, Sutan Alif Tuanku Bagindo Muhammad dari Kerajaan Padang Laweh, Zulkarnaen Tuanku Rajo Disambah dari Kerajaan Sungai Pagu, dan Tuanku Rajo Firman dari Kerajaan Jambu Lipo.²⁸

Pada tahun 2015 Sutan Riska merupakan kandidat bupati di Kabupaten Dharmasraya dan didukung oleh berbagai lapisan masyarakat di wilayah ini, seperti Marlon Martua Datuk Rangkayo Mulieh (mantan Bupati Dharmasraya), Tugimin (mantan Wakil Bupati Dharmasraya), Khairul Saleh Datuk Panduko Segar (mantan calon bupati Dharmasraya), Abdul Haris Tuanku Sati (pemangku adat Pulau Punjung), dan Rasul Hamidi Datuk Sari Dano. Pencalonan diri Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai calon bupati Kabupaten Dharmasraya, juga mendapat respon positif dari berbagai kalangan masyarakat di Dharmasraya. Selain faktor ekonomi yang menonjol, identitas Sutan Riska sebagai pemangku adat Kerajaan Koto Besar juga menjadi nilai tambah baginya untuk dipilih masyarakat sebagai bupati di Kabupaten Dharmasraya.

Pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung tanggal 9 Desember 2015, Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama pasangannya Amrizal Datuk Rajo Medan memperoleh 61.775 suara (63,75%), dan kandidat lainnya Adi Gunawan dan Johson Putra memperoleh 35.122 suara (36,25%).²⁹ Sutan Riska terpilih sebagai bupati setelah mengalahkan pasangan petahana dengan margin kemenangan terbesar kedua se-Indonesia. Sejak saat itu, identitas Kerajaan Koto Besar semakin dikenal oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan

²⁸ “Sumpah Tiga Abad Silam Dicabut”, *Padang Ekspres*, 25 Mei 2013.

²⁹ Hasil Rekapitulasi Suara Pemilukada Kabupaten Dharmasraya 2015”, *website : kpu-dharmasrayakab.go.id*, 2015.

bahkan nasional. Pada tahun 2016, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menoreh rekor sebagai kepala daerah termuda dalam sejarah demokrasi Indonesia dan menjadi bintang tamu dalam acara *talkshow* Mata Najwa di Metro TV.³⁰

Sehubungan dengan permasalahan yang ditampilkan di atas, penulis menganggap kajian tentang peran pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya menarik untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan realita sosial dan fenomena kekuasaan pewaris Kerajaan Koto Besar yang penulis temukan di lapangan, maka penelitian ini penulis angkat dengan judul “Ragam Peran Pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya (1964-2016)”.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang dikaji, maka perlu dibuat pembatasan tentang fokus kajian yang meliputi batasan spasial dan temporalnya. Dalam penelitian ini batasan spasialnya adalah wilayah adat Kerajaan Koto Besar. Daerah-daerah yang mendapat pengaruh Kerajaan Koto Besar meliputi daerah Koto Besar, Abai Siat, Bonjol, Bulangan, Ampang Kuranji, Koto Baru, Koto Salak dan Ampalu. Keseluruhan daerah yang disebutkan di atas, berada dalam wilayah administratif Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya baru terbentuk sejak tanggal 7 Januari 2004 sebagai kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Namun, untuk memudahkan jalannya penelitian, meskipun terdapat uraian peristiwa yang terjadi sebelum tahun 2004, penulis menyebutnya Kabupaten Dharmasraya saja.

³⁰ “Mata Najwa: Darah Muda Daerah”, *Metro TV*, 13 Januari 2016.

Batasan temporal penelitian ini adalah tahun 1964-2016. Tahun 1964 dijadikan batasan awal, karena pada tahun ini merupakan awal mula pewaris Kerajaan Koto Besar kembali memperlihatkan perannya di wilayah Dharmasraya sekarang. Pada tahun 1964 pemerintah mulai merancang pembangunan Jalan Lintas Sumatera dengan dibentuknya sebuah lembaga yang bernama “Otorita Pembangunan Jalan Lintas Sumatera”, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Melalui lembaga ini, pemerintah melakukan pendekatan dengan pewaris kerajaan untuk membebaskan tanah ulayat mereka di perbatasan Jambi sampai Koto Baru, dalam proses kelancaran pembangunan Jalan Lintas Sumatera di daerah tersebut.

Tahun 2016 dijadikan batasan akhir penelitian, karena pada tahun itu merupakan puncak dari keragaman peran pewaris Kerajaan Koto Besar untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya pemangku adat Koto Besar, Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai Bupati Kabupaten Dharmasraya (2016-2021). Sebagai kepala daerah termuda dalam pemerintahan modern, sekaligus pemangku adat dalam sistem tradisional, membuat popularitas Sutan Riska menjadi naik yang berdampak pada dikenalnya Koto Besar oleh masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Dharmasraya dan Sumatera Barat pada umumnya.

Persoalan pokok dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam penulisannya, yaitu:

1. Bagaimana struktur masyarakat dan pengaruh Kerajaan Koto Besar pada masa kepemimpinan tradisional?

2. Bagaimana kondisi pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan Orde Lama?
3. Bagaimana peran pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa Orde Baru dan otonomi daerah di Dharmasraya?
4. Apa modalitas yang dimiliki oleh pewaris Kerajaan Koto Besar dalam membangun legitimasi kekuasaan di Dharmasraya?
5. Siapa yang memanfaatkan modalitas yang dimiliki pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa Orde Baru dan otonomi daerah di Dharmasraya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ragam peran pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 1964-2016. Dengan adanya tulisan ini dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Menjelaskan struktur masyarakat dan pengaruh Kerajaan Koto Besar pada masa kepemimpinan tradisional.
2. Menjelaskan kondisi pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan Orde Lama.
3. Menganalisis peran pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa Orde Baru dan Otonomi Daerah di Dharmasraya.
4. Menjelaskan modalitas yang dimiliki oleh pewaris Kerajaan Koto Besar dalam membangun legitimasi kekuasaan di Dharmasraya.
5. Menjelaskan kelompok yang memanfaatkan modal yang dimiliki pewaris Kerajaan Koto Besar pada masa Orde Baru dan otonomi daerah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama di wilayah adat Kerajaan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya dan Sumatera Barat secara luas, supaya lebih mengenal warisan sejarah dan kebudayaan lokal yang mereka miliki, serta memahami hubungan peristiwa-peristiwa masa dahulunya dengan kondisi hari ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi generasi yang akan datang dalam meneliti tema dan pembahasan serupa. Selanjutnya, tulisan ini juga diharapkan bisa menjadi mozaik bagi koleksi kepustakaan di lembaga pendidikan dan instansi pemerintahan, serta menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.4 Tinjauan Pustaka

Informasi tentang Kerajaan Koto Besar dapat ditelusuri dalam beberapa literatur. Sumber utama yang menjadi referensi tulisan ini adalah beberapa catatan Kontroler Belanda, Palmer van den Broek, “Nota Omtrent de Middelen van Bestaan der Bevolking in Kota Basar en Onderhoorige Landschappen en de Batanghari Districten” dan “Nota over Kota Basar en Onderhoorige Landschappen Met Uitzondering van Soengei Koenit en Talao”, yang dipublikasikan dalam *Tijdschrift voor Indische “Taal, Land en Volkenkunde”*, terbitan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* pada tahun 1907. Dalam catatan tersebut dijelaskan tentang kondisi Koto Besar secara umum, seperti letak geografis, kebudayaan lokal, daerah-daerah yang berada di bawah supremasi Yang di Pertuan Koto Besar, *urang gadang* di wilayah adat Kerajaan

Koto Besar, serta statistik penduduk dan mata pencaharian di daerah-daerah yang mendapat pengaruh Kerajaan Koto Besar.

Sumber lain dari tulisan ini adalah sebuah *tambo* kerajaan yang bertuliskan *Sejarah Anak Nagari Koto Besar yang Datang dari Pagaruyung Minangkabau*. Tulisan ini dapat dijadikan rujukan karena bercerita tentang perjalanan Tuan Puti Langguk dan rombongan dari Kerajaan Pagaruyung, yang dipercaya masyarakat sebagai pendiri Kerajaan Koto Besar. Buku panduan *Monografi Nagari Koto Besar*, yang menjelaskan secara rinci tentang kondisi Koto Besar dalam bentuk kekinian. Kemudian beberapa sumber yang dimuat dalam surat kabar, seperti dalam *Padang Ekspres* tentang proses *maungkai sumpah* antara pewaris Kerajaan Koto Besar dan Pagaruyung, serta dalam surat kabar *Haluan* tentang kematian Sutan Darman Tuanku Kerajaan, pengangkatan Sutan Riska Tuanku Kerajaan sebagai pemangku adat Kerajaan Koto Besar dan keterpilihan Sutan Riska sebagai Bupati Kabupaten Dharmasraya.

Buku yang ditulis oleh Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang* dan *Sumatera Barat Plakat Panjang*, juga dapat dijadikan rujukan karena membahas tentang kondisi Minangkabau sebelum dan setelah dikuasai Pemerintah Hindia Belanda. Dalam buku *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, dijelaskan bahwa Kerajaan Koto Besar dan kerajaan-kerajaan lainnya di bekas wilayah Kerajaan Dharmasraya, merupakan sebuah negeri merdeka sebelum melakukan perjanjian tahun 1905 dengan Pemerintah Hindia Belanda, sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Belanda di Rantau Batanghari. Dalam buku *Sumatera Barat Plakat Panjang*, terdapat sebuah peta yang menggambarkan

tentang Koto Besar sebagai salah satu daerah yang ingin ditaklukkan Belanda secara damai pada awal abad ke-20.

Tulisan yang relevan dengan penelitian ini yang mengambil lokasi di Kabupaten Dharmasraya diantaranya adalah: buku *Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Dharmasraya* yang ditulis oleh Efrianto dan Ajisman. Tulisan ini menguraikan tentang proses berdirinya kerajaan, nama-nama raja dan sistem pemerintahan, daerah kekuasaan, serta peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan di Kabupaten Dharmasraya, yaitu Kerajaan Pulau Punjung, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Padang Laweh dan Kerajaan Koto Besar. Namun, buku ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan bagaimana sejarah Kerajaan Koto Besar, kondisi Koto Besar pada masa Pemerintah Hindia Belanda, serta peran pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya.

Tulisan lainnya yang membahas tentang kerajaan-kerajaan di Kabupaten Dharmasraya, yaitu skripsi Sopan van Java DS tentang *Eksistensi Kerajaan Pulau Punjung (1967-2010)*, dan skripsi Arimadona yang berjudul *Eksistensi Kerajaan Siguntur Pada Masa Orde Baru hingga Otonomi Daerah 1966-2009*. Kedua tulisan ini dapat menjadi referensi dalam penulisan tesis ini, karena kedua kerajaan tersebut juga berafiliasi dengan Kerajaan Koto Besar, yaitu: *sapih balahan* dari Kerajaan Pagaruyung di daerah Rantau Batanghari, kelompok yang dilibatkan dalam perjanjian dengan Hindia Belanda pada tahun 1905, serta bersama-sama memberikan gelar adat kepada Surya Paloh tahun 2004. Meskipun demikian, kedua tulisan tersebut tidak memfokuskan kajiannya pada keragaman peran pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya.

Dinamika kerajaan-kerajaan Minangkabau dalam berbagai periode waktu dapat dilihat dari kumpulan tulisan yang diterbitkan oleh Museum Nagari Sumatera Barat tentang *Kerajaan Minangkabau dalam Pusaran Badai Zaman*. Salah satu yang menarik dalam buku ini adalah tulisan Fikrul Hanif Sufyan yang mengkaji tentang Kerajaan Siguntur dalam perspektif historiografi tradisional dan peninggalan budayanya. Sebagaimana diketahui, Kerajaan Siguntur merupakan salah satu peninggalan tradisional di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki hubungan dengan Kerajaan Koto Besar. Pada pilkada 2015, pewaris Kerajaan Siguntur juga menjadi mitra politik pemangku adat Kerajaan Koto Besar, Sutan Riska.

Persoalan pencitraan dunia kerajaan di Minangkabau kontemporer dapat dilihat dalam disertasi Nopriyasman, dengan judul *Politik Representasi Istana Basa Pagaruyung sebagai Identitas Minangkabau di Sumatera Barat*. Dalam disertasi ini dijelaskan tentang pencitraan yang dilakukan oleh kelompok pewaris Kerajaan Pagaruyung melalui *istano basa* yang diagung-agungkan sebagai representasi kejayaan Kerajaan Pagaruyung masa lampau. Dalam tulisan ini juga diuraikan keterkaitan antara Kerajaan Pagaruyung dengan kerajaan-kerajaan *rantau* masa lampau hingga kontemporer. Sebagai mana yang diketahui, bahwa kerajaan di daerah *rantau*, mengakui bahwa mereka berasal dari Pagaruyung. Oleh sebab itu tulisan ini mempunyai relevansi kuat untuk memperlihatkan hubungan Kerajaan Pagaruyung dengan Kerajaan Koto Besar, serta politik pencitraan yang diterapkan oleh keduanya dalam memperoleh legitimasi kekuasaan pada masa otonomi daerah dengan bentuk dan cara yang berbeda.

1.5 Kerangka Teori

Tulisan ini termasuk dalam kajian sejarah sosial. Sejarah sosial dapat diartikan sebagai sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok.³¹ Kelompok yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pewaris Kerajaan Koto Besar, terutama dalam usaha yang mereka lakukan untuk memperlihatkan perannya di Kabupaten Dharmasraya. Manifestasi kehidupan sosial memiliki keberagaman, salah satunya adalah kehidupan sebuah keluarga. Dalam hal ini peran pewaris kerajaan di luar lingkungannya sendiri terdapat pada kontribusi mereka dalam memuluskan program pemerintah Orde Baru yang berorientasi kepada pembangunan nasional di wilayah adat Kerajaan Koto Besar, yaitu pembangunan Jalan Lintas Sumatera (1964-1975) dan program transmigrasi Sitiung (1976-1980). Pada masa otonomi daerah, peran pewaris kerajaan dalam proses pembentukan Kabupaten Dharmasraya merupakan bentuk hubungan sosial mereka dengan masyarakat di luar lingkungannya Partisipasi politik pewaris Kerajaan Koto Besar dalam konteks lokal Kabupaten Dharmasraya juga menjadi bentuk hubungan sosial yang mereka lakukan dengan masyarakat yang lebih luas dan teraktual.

Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah peran dan pewaris kerajaan. Menurut Soerjono Soekanto, peran (*role*) adalah sesuatu yang diharapkan dan dimiliki oleh individu atau kelompok yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan seseorang atau kelompok dalam menjalankan hak dan

³¹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 50.

kewajibannya sesuai dengan status dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Apa bila seseorang atau kelompok melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia telah menjalankan suatu peran.³²

Istilah peran biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu, ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam dunia teater dianalogikan dengan posisi seseorang atau kelompok dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi dalam suatu penampilan atau unjuk peran (*role performance*).³³

Aktor yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar yang memiliki beragam peran dalam kehidupan masyarakat di Dharmasraya. Pada masa Orde Baru, pewaris Kerajaan Koto Besar merupakan mitra pemerintah di tingkat lokal yang bertugas sebagai tangan kanan untuk melancarkan program pemerintah di wilayah tersebut, seperti pembangunan Jalan Lintas Sumatera dan program transmigrasi Sitiung. Pada masa pemerintahan desa, pewaris Kerajaan Koto Besar berperan sebagai pengurus Partai Golkar di tingkat lokal Kecamatan Sungai Rumbai. Sedangkan pada masa otonomi daerah, pewaris Kerajaan Koto Besar memiliki peran ganda, yaitu sebagai masyarakat dan orang yang mengontrol pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya.

Pewaris kerajaan adalah orang yang berhak menerima gelar warisan sebuah kerajaan, dalam hal ini adalah gelar kebesaran Kerajaan Koto Besar yang diturunkan secara matriaki berdasarkan garis keturunan ibu. Jane Drakard dalam A

³² Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 243.

³³ Edy Suhardono, *Teori Peran : Konsep, Derivasi dan Implikasinya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

Kingdom of Words Language and Power in Sumatra, menjelaskan bahwa kerajaan dalam konteks adat Minangkabau merupakan sebuah pengecualian dalam tatanan sebuah kerajaan sebagaimana yang dipahami di Indonesia. Lembaga kerajaan disimbolkan sebagai kesatuan Minangkabau bukanlah lembaga yang aktif, tetapi lebih sebagai lembaga yang mengambil jalan pasif (tidak bersifat militer), atau kerajaan dalam ciptaan “kata-kata”. Kerabat kerajaan dihormati tetapi tidak mempunyai kuasa (*powerless*). Kerajaan di Minangkabau lebih merupakan wujud otonomi dan kebebasan untuk mengatur diri sendiri yang telah lama dijadikan ketetapan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.³⁴ Seperti halnya Kerajaan Koto Besar yang hanya ditandai dengan sebuah rumah *gadang* dan memiliki tanah ulayat yang luas sebagai bukti bahwa mereka berbeda dengan masyarakat di sekitarnya.

Dalam penelitian ini menggunakan teori modalitas Pierre Bourdieu dalam menganalisisnya. Terkait dengan pemikirannya tentang modalitas, Bourdieu membagi modalitas menjadi lima bagian, yaitu: *social capital*, *economic capital*, *political capital*, *symbolic capital* dan *cultural capital* yang menjadi bagian dalam melegitimasi kepemilikan kekuasaan (*legitimate authority*). Pierre Bourdieu sebagai penggagas pemikiran teori modalitas menjelaskan kepemilikan modal sosial (*social capital*) merupakan sebuah kekuatan utama bagi setiap individu atau kelompok untuk merebut dan mendapatkan kekuasaan dalam sebuah *space* yang disebut sebagai arena kekuasaan.³⁵

³⁴ Jane Drakard, *A Kingdom of Words Language and Power in Sumatra*, (New York: Oxford University Press, 1999).

³⁵ Alrizal Mutahir, *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu: Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 51.

Dalam konteks pewaris Kerajaan Koto Besar, modalitas yang mereka miliki pada hakikatnya dibagi dalam dua bentuk pemanfaatan, yaitu: modalitas yang dimanfaatkan oleh orang lain atau (pemerintah) dan modalitas yang dimanfaatkan oleh kelompok pewaris kerajaan. Pemanfaatan modalitas pewaris Kerajaan Koto Besar oleh pemerintah dapat dilihat pada masa pemerintahan Orde Baru, posisi pewaris hanyalah kaki tangan pemerintah di daerah, yang bertujuan untuk menguatkan dominasi kekuasaan pemerintah di wilayah tersebut. Pada masa otonomi daerah, modalitas yang mereka miliki barulah dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri, seperti Sutan Darman dan Aprisal Tuanku Rajo Dipati saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Dharmasraya pada tahun 2004, serta Sutan Riska saat bertarung sebagai kandidat bupati di Kabupaten Dharmasraya.

Modal sosial memberikan penekanan pada kebersamaan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dan senantiasa terikat pada nilai-nilai dan norma yang dipedomani sebagai acuan bersikap dalam membentuk hubungan dengan pihak lain. Modal sosial digunakan oleh individu atau kelompok masyarakat untuk mempertahankan sesuatu nilai-nilai dan norma dengan membentuk suatu jaringan-jaringan kerjasama dengan pihak lain.³⁶ Kepemilikan modalitas yang dimiliki oleh kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar turut menjadi kekuatan mereka dalam membangun jaringan dengan kelompok sosial lainnya, sehingga bermuara pada legitimasi kekuasaan mereka di Kabupaten Dharmasraya.

³⁶ Witrianto, "Modal Sosial dan Pembangunan Manusia Melayu: Kasus Indonesia dan Malaysia" dalam Mohammad Redzuan Othman dkk (eds), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*, (Kuala Lumpur: Arah Publications, 2009), hlm. 632.

1.6 Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Dalam penulisan sejarah, penggunaan metode dalam melakukan penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal tersebut menyebabkan sejarah menjadi sebuah ilmu yang ilmiah. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode sejarah sebagai alatnya. Louis Gottschalk dalam *Mengerti Sejarah* menjelaskan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, dimulai dari pengumpulan data hingga penulisan sejarah.³⁷

Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahap, yaitu: (1) *heuristik*, *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi*.³⁸ Pada tahap heuristik penulis melakukan pengumpulan data, sumber, informasi dan jejak masa lampau baik bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer penulis dapatkan dari repro peninggalan Kerajaan Koto Besar, seperti *tambo*, stempel kerajaan dan angka yang tertulis pada makam raja-raja Koto Besar. Selanjutnya, sumber primer penulis dapatkan melalui metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan metode wawancara. Metode wawancara ini lebih penulis fokuskan kepada kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar, seperti Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Aprisal Tuanku Rajo Dipati, Suhatri, Puti Norma, Puti Yusrawati, Puti Teten Sumarni, serta pihak-pihak berkompeten yang terkait dengan tema penelitian ini.

Kegiatan pengumpulan data sekunder penulis lakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penggunaan studi kepustakaan penulis lakukan dengan mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Jakarta,

³⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1985), hlm. 32.

³⁸ *Ibid*, hlm. 41.

Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau (PDKM) Padang Panjang, Perpustakaan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar, Perpustakaan Museum Adityawarman Padang, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya, Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Jurusan Sosiologi Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang, serta buku-buku ilmiah yang telah dipublikasikan di media elektronik. Dalam penelitian pustaka juga ada sumber-sumber sekunder lain yang penulis gunakan untuk menunjang penelitian, seperti surat kabar, artikel, jurnal, website dan lain-lain.

Setelah data atau sumber dikumpulkan maka penulis melakukan kritik terhadap sumber tersebut. Kritik terhadap sumber ini dapat digolongkan kedalam dua macam bentuk, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern yaitu kritik terhadap material bahan sumber yang mesti dipertanyakan dengan pertanyaan apakah sumber yang didapat merupakan sumber asli. Kritik intern yaitu kritik yang diberikan atas kandungan informasi yang diberikan oleh sumber-sumber tersebut. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena kebenaran sebuah penelitian dan hasil yang diciptakan tergantung kepada kebenaran fakta atau sumber yang didapatkan.

Setelah langkah ini selesai maka penulis melakukan interpretasi data, yaitu tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang akan digunakan dalam proses

historiografi. Tujuan dilakukannya interpretasi sumber adalah untuk menemukan fakta yang akurat untuk dijadikan sebagai fakta sejarah dan dipakai sebagai bahan sumber. Setelah melalui semua tahap tersebut, penulis menuliskan ke dalam bentuk tulisan cerita sejarah yang berkesinambungan dan bermakna.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini mengkaji tentang “Ragam Peran Pewaris Kerajaan Koto Besar di Kabupaten Dharmasraya (1964-2016)”. Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab, yang antara satu bab dengan bagian yang lainnya saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan. Untuk memperjelas apa yang akan diungkapkan, maka penulisan ini dibagi atas beberapa pokok kajian, yaitu:

Bab pertama adalah “Pendahuluan”. Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa tema ini menarik untuk diteliti, batasan dan rumusan masalah yang menjadi pokok pikiran dalam penulisan, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan yang menjadi rujukan penulisan tesis ini, kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam menganalisis fakta dan fenomena yang ditemukan di lapangan, metode penelitian dan bahan sumber yang digunakan yang berpedoman pada metode dan sumber sejarah, serta sistematika penulisan untuk menggambarkan pembahasan yang akan diuraikan.

Bab kedua adalah “Monografi Daerah Koto Besar”. Pada bagian ini menjelaskan tentang asal-usul nama Koto Besar dan dinamika penyebutan identitas Koto Besar berdasarkan periode kekuasaan, letak geografis Koto Besar

berdasarkan gambaran permukaan bumi, potensi alam dan mata pencaharian sebagai sumber perekonomian masyarakat, gambaran administratif dalam beberapa periode kekuasaan, struktur sosial yang menggambarkan posisi pewaris kerajaan di tengah masyarakat, serta sosial budaya masyarakat Koto Besar yang meliputi tradisi pengangkatan anak (*bainduak*), tradisi ziarah adat, budaya perkawinan, bahasa dan dialektika Koto Besar, serta tradisi-tradisi yang telah hilang, seperti *bakaua*, *batoboh* dan tradisi membuat lomang sokuih, sebagai bentuk peninggalan nenek moyang Koto Besar masa lampau.

Bab ketiga adalah “Kerajaan Koto Besar di Masa Lampau”. Pada bagian ini menjelaskan tentang dinamika Kerajaan Koto Besar sejak terbentuknya hingga berakhirnya rezim Orde Lama. Masalah yang akan dibahas dalam bab ini meliputi kondisi Kerajaan Koto Besar pada masa kepemimpinan tradisional, yaitu: sejarah terbentuknya Kerajaan Koto Besar, daerah kekuasaan dan batas wilayah, raja-raja dan mekanisme suksesi kepemimpinan, serta struktur adat dan pemerintahan. Selanjutnya juga membahas tentang kondisi Kerajaan Koto Besar pada masa Hindia Belanda, Kerajaan Koto Besar pasca kemerdekaan, serta peninggalan Kerajaan Koto Besar.

Bab keempat adalah “Peran Pewaris Kerajaan Koto Besar Pada Masa Orde Baru”. Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi kelompok pewaris Kerajaan Koto Besar di awal Orde Baru, peran pewaris Kerajaan Koto Besar dalam derap pembangunan daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, seperti pembangunan Jalan Lintas Sumatera dan program transmigrasi Sitiung. Dalam bab ini juga menguraikan tentang peran pewaris Kerajaan Koto Besar dalam dunia politik pada

masa Orde Baru, yaitu: pada masa pemerintahan desa dan kiprah pewaris Kerajaan Koto Besar dalam hegemoni politik Partai Golkar.

Bab kelima adalah “Pewaris Kerajaan Koto Besar dalam Konstelasi Politik Dharmasraya dan Kebangkitan Pasca Reformasi”. Pada bagian ini membahas tentang kondisi pewaris kerajaan Koto Besar di awal masa reformasi, pewaris Kerajaan Koto Besar dalam pemekaran daerah Kabupaten Dharmasraya, modalitas yang dimiliki oleh pewaris Kerajaan Koto Besar dalam membangun kuasa simbol di Dharmasraya, yaitu modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), modal politik (*politic capital*), modal simbolik (*symbolic capital*) dan modal budaya (*cultural capital*), serta kiprah beberapa tokoh pewaris Kerajaan Koto Besar pasca reformasi, seperti Sutan Darman Tuanku Kerajaan, Aprisal Tuanku Rajo Dipati dan Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Bab keenam adalah “Kesimpulan”. Bab ini adalah bagian penutup dan merupakan kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini. Sebagai sebuah kesimpulan, maka bagian ini dapat merumuskan pokok pikiran dari tema penelitian yang dituliskan.